



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah, serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.



Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;



- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2016–2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.1.
Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	816.226.053.570	959.717.412.277	926.095.278.691	972.546.394.700	933.950.338.799	3,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	74.823.080.565	101.246.072.215	88.592.824.575	86.449.750.931	85.079.640.924	4,70
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.177.005.323	15.513.025.177	21.947.183.834	21.648.331.860	15.678.984.321	2,11
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.559.012.467	5.963.132.236	6.183.958.819	6.199.125.127	5.218.328.239	-5,24
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.996.676.620	7.990.350.405	7.507.271.925	7.048.979.947	6.441.724.012	3,12
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	46.090.386.155	71.779.564.397	52.954.409.997	51.553.313.997	57.740.604.351	9,72
4.2	DANA PERIMBANGAN	676.380.888.419	779.291.768.009	719.295.914.950	743.591.609.115	670.079.457.573	0,25
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.650.613.543	10.304.231.622	9.151.001.086	7.101.462.284	8.218.630.842	-7,35
4.2.2	Dana Alokasi Umum	503.115.430.000	499.067.465.000	501.312.256.000	517.570.214.000	472.964.568.000	-1,43
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	161.614.844.876	269.920.071.387	208.832.657.864	218.919.932.831	188.896.258.731	8,87
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.022.084.586	79.179.572.053	118.206.539.166	142.505.034.654	178.791.240.303	29,27
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.523.950.432	852.593.410	24.983.517.997	33.704.597.329	30.501.564.896	691,76
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	17.477.876.554	22.188.306.443	20.771.848.169	84.043.335.000	126.647.348.502	93,97
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.020.257.600	56.138.672.200	72.451.173.000	24.757.102.325	21.642.326.905	-2,27
4.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi /Pemerintah Daerah lainnya	216.000.000	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2016–2020, realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun 3,78%. Untuk komponen pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami peningkatan rata-rata per tahun 4,70%, sedangkan untuk komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,25% dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,17%.

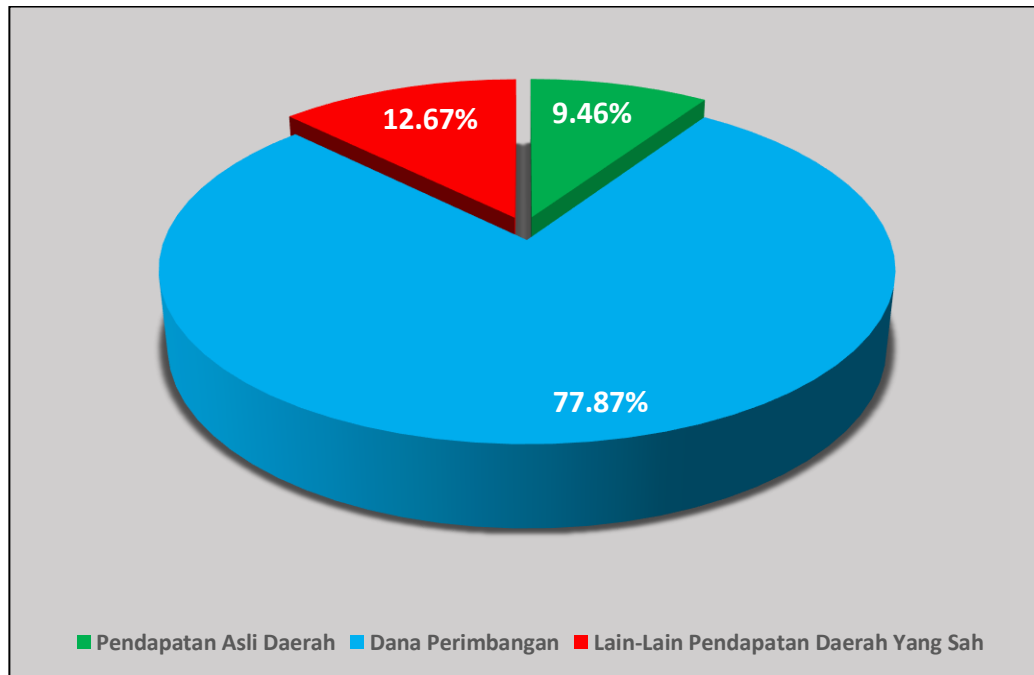
Dari komponen PAD, obyek pendapatan yang mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi COVID-19 adalah retribusi daerah yaitu -5,24%, sedangkan obyek pendapatan yang lain justru cenderung mengalami kenaikan yaitu obyek pajak daerah sebesar 2,11%, obyek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,12% dan obyek lain-lain PAD yang sah sebesar 9,72%.

Untuk komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sangat bergantung pada penerimaan pajak negara, yang mana mengalami akibat tekanan ekonomi dunia maupun dampak pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah pusat untuk melakukan perubahan kebijakan keuangan negara dalam rangka menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 dimaksud.

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.



Grafik 3.1
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 77,98%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 12,56% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,46% dari seluruh total pendapatan. Selanjutnya rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

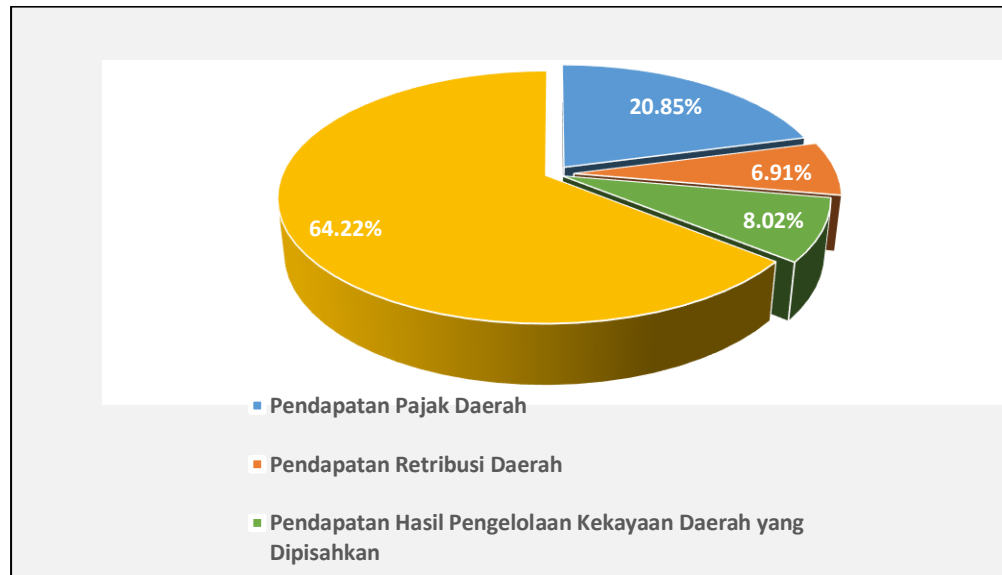
a) Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Lain-Lain PAD Yang Sah yaitu sebesar 63,95%. Sisanya terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 21,04%, Pendapatan Hasil



Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 8,02% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 6,99%

Grafik 3.2
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020



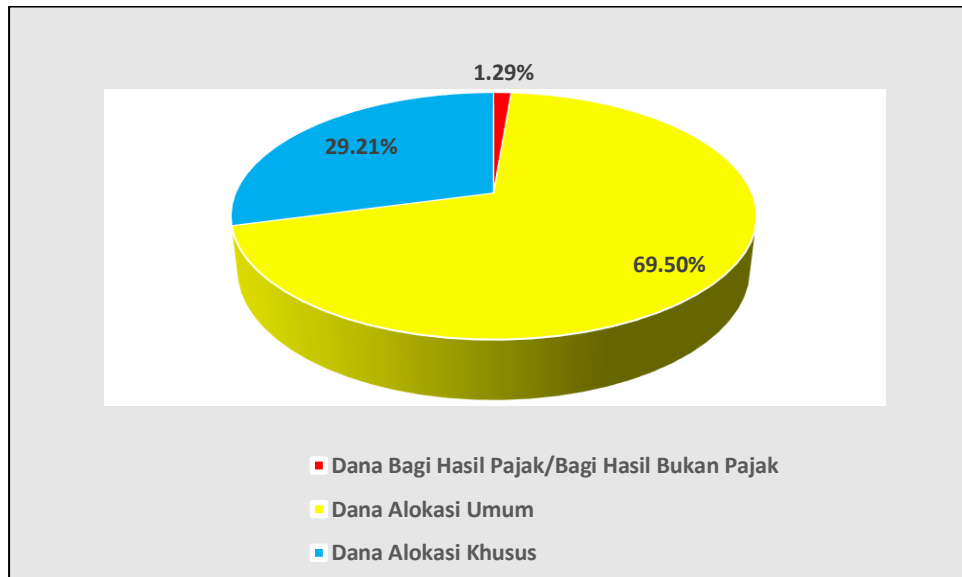
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

b) Dana Perimbangan

Komposisi Dana Perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 69,50%, Dana Alokasi Khusus sebesar 29,21% sedangkan sisanya sebesar 1,29% merupakan Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.



Grafik 3.3
Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2016-2020



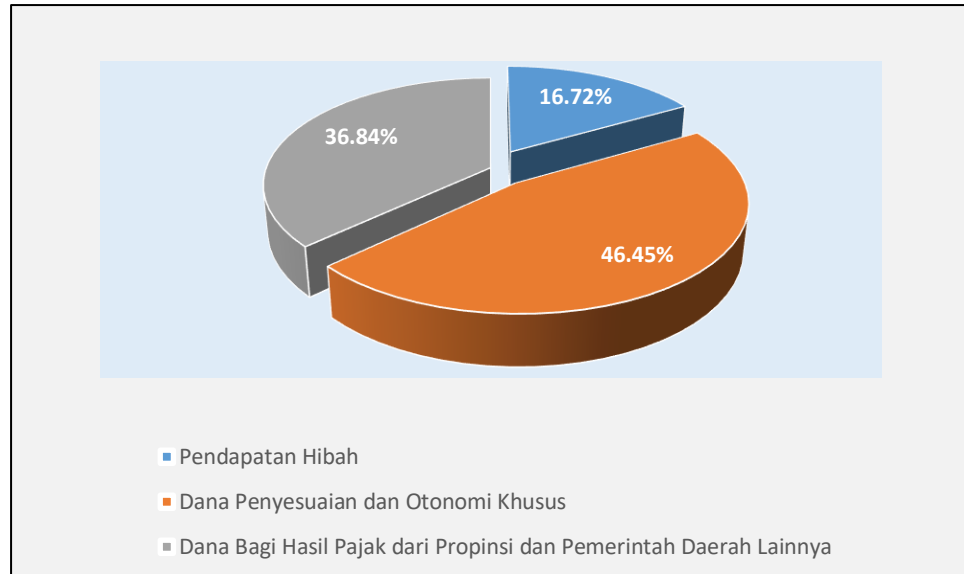
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 44,67%, sisanya sebesar 40,44% berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan 14,96% berupa Pendapatan Hibah. Rata-rata proporsi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4. dibawah ini.



Grafik 3.4
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah

2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa lainnya, dan belanja tidak terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah.



Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016–2020

Kode	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA	834,489,268,773	939,748,398,806	948,137,256,230	992,180,923,716	960,175,047,336	3.73
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	442,192,384,168	429,568,482,147	442,833,384,273	458,211,282,460	501,005,413,706	3.26
5.1.1	Belanja Pegawai	340,664,627,568	296,437,376,757	300,808,402,056	308,236,058,085	300,125,015,085	- 2.92
5.1.2	Belanja Subsidi	3,712,608,000	4,083,840,000	-	-	-	-
5.1.3	Belanja Hibah	1,905,457,500	3,730,400,000	7,789,806,000	8,046,348,000	38,278,192,000	145.90
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	12,585,000,000	7,960,000,000	2,975,000,000	4,620,000,000	-
5.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada propinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,228,843,559	1,522,308,422	2,071,812,412	1,705,811,840	1,705,811,840	10.58
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	93,477,551,470	110,971,631,968	124,193,933,368	137,248,064,535	136,461,986,923	10.14
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	1,203,296,071	237,925,000	9,430,437	-	19,814,407,858	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	392,296,884,605	510,179,916,659	505,303,871,957	533,969,641,256	459,169,633,630	5.19
5.2.1	Belanja Pegawai	62,237,183,591	72,303,076,012	81,950,927,345	93,792,355,353	98,381,251,092	12.21
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	137,948,765,430	189,470,908,024	228,952,632,214	227,213,947,019	183,687,943,917	9.57
5.2.3	Belanja Modal	192,110,935,584	248,405,932,623	194,400,312,398	212,963,338,884	177,100,438,621	0.07

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Gambaran belanja daerah berdasarkan tabel 3.2 yaitu pada periode Tahun 2016-2020 belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 3,73%, dengan obyek Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,26% dan Belanja Langsung sebesar 5,19%. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesarnya pertumbuhannya adalah Belanja Hibah dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 145,90%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan hibah kepada KPU/BAWASLU/TNI/POLRI/ untuk dukungan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2020. Sedangkan dari sisi belanja langsung secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,19%, yang mana komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu komponen belanja pegawai sebesar 12,21%.

Berdasarkan data tabel 3.3. dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pada Tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.248.924.496.540 dan Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp.266.137.824.681, yang termasuk dalam kategori kelompok kemampuan keuangan rendah.



Tabel 3.3.
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan Asli Daerah	74,823,080,565	101,246,072,215	88,592,824,575	86,449,750,931	85,079,640,924
2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,650,613,543	10,304,231,622	9,151,001,086	7,101,462,284	8,218,630,842
3	Dana Alokasi Umum	503,115,430,000	499,067,465,000	501,312,256,000	517,570,214,000	472,964,568,000
	Jumlah A	589,589,124,108	610,617,768,837	599,056,081,661	611,121,427,215	566,262,839,766
B	Belanja Pegawai					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	340,664,627,568	296,437,376,757	300,808,402,056	308,236,058,085	300,125,015,085
2	Tambahan penghasilan PNS	-	-	-	-	-
	Jumlah B	340,664,627,568	296,437,376,757	300,808,402,056	308,236,058,085	300,125,015,085
	Kemampuan Keuangan Daerah	248,924,496,540	314,180,392,080	298,247,679,605	302,885,369,130	266,137,824,681

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Belu.



Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6	PEMBIAYAAN	96.095.135.508	82.002.205.024	102.016.746.495	79.979.697.955	52.527.176.309	- 11,55
6.1	Penerimaan Pembiayaan	96.095.135.508	82.002.205.024	102.016.746.495	79.979.697.955	60.568.138.315	- 9,03
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	96.095.135.508	81.915.647.124	101.971.218.495	79.974.768.955	60.345.268.939	- 9,10
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Kembali Investasi Bergulir	-	86.557.900	45.528.000	4.929.000	222.869.376	1.428,34
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	8.040.962.006	
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	6.220.862.006	-
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	1.820.100.000	-
	Pembiayaan Netto	96.095.135.508	82.002.205.024	102.016.746.495	79.979.697.955	52.527.176.309	-11,55

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami penurunan rata rata sebesar 11,55%. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 9,03%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam kurun waktu Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.5
Neraca Kabupaten Belu
Tahun 2016-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	102,413,752,310	81,780,041,257.73	63,928,070,513.78	12,808,816,328.61	13,178,786,934.02	(1.212)
Kas Di Bendahara Penerimaan	2,884,000		-			(1.000)
Kas Di Bendahara Pengeluaran	97,906,798		-	1,367,075.00	317,630,063.00	56.836
Kas Di BLUD	4,719,169,306	1,492,595,034.00	1,304,363,567.00	1,692,087,081.00	688,126,295.83	(0.661)
Kas Di Bendahara FKTP	1,662,307,342	3,887,339,858.00	1,888,660,928.00	744,566,691.60	1,971,736,330.60	0.631
Kas Di Bendahara Bos		3,867,726,819.00	3,880,356,870.00	1,624,989,298.00	7,193,652,345.00	0.279
Kas Lainnya					2,264,298,994.00	-
Setara Kas			31,000,000,000.00	71,000,000,000.00	37,000,000,000.00	1.171
Investasi Jangka Pendek			8,000,000,000.00			(1.000)
Piutang Pajak	12,362,341,331	16,618,059,524.07	28,320,455,080.22	13,493,483,223.97	13,599,515,876.28	0.527
Penyisihan Piutang	(8,959,753,669)	(11,178,266,229.27)	(11,932,644,716.09)	(10,148,880,708.05)	(10,767,677,144.26)	0.181
Piutang Pajak Neto		5,439,793,294.80	16,387,810,364.13	3,344,602,515.92	2,831,838,732.02	1.178
Piutang Retribusi	148,355,000			284,571,000.00	356,671,000.00	(0.937)
Penyisihan Piutang Retribusi				(179,723,100.00)	(268,351,600.00)	0.123
Piutang Retribusi Neto		-	-	104,847,900.00	88,319,400.00	(0.039)
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah				12,175,500,683.00	12,393,838,472.00	0.004
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah				(1,859,324,750.00)		(0.250)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah Neto		-	-	10,316,175,933.00	12,393,838,472.00	0.050
Piutang BLUD						
Penyisihan Piutang BLUD						
Piutang BLUD Neto		-	-	-	-	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Provinsi				3,149,147,184.00	1,169,697,613.06	(0.157)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- Provinsi				-		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Provinsi Neto		-	-	3,149,147,184.00	1,169,697,613.06	(0.157)
Belanja Dibayar Dimuka					1,823,524,752.00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48,200,000					(1.000)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						
Bagian Lancar Piutang Sewa						
Bagian Lancar Piutang Kerjasama						
Piutang Lainnya	4,888,319,418	7,660,689,178.00	63,388,800.00	-	159,783,800.00	(1.425)
Penyisihan Piutang Lainnya						
Piutang Lainnya Neto		7,660,689,178.00	63,388,800.00	-	159,783,800.00	(1.992)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak						
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak						
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Neto						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan						
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Neto						
JUMLAH ASET LANCAR	154.933.916.790,54	115.299.795.985,73	149.581.624.156,91	116.407.293.680,13	99.498.656.306,60	(0,217)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	7.671.500	43.336.700,00	4.425.902.100,00	4.380.374.100,00	4.375.445.100,00	105,767
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)			(4.328.542.200,00)	(4.333.910.950,00)	(4.367.921.350,00)	0,003
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) neto	7.671.500	43.336.700,00	97.359.900,00	46.463.150,00	7.523.750,00	5,163
Dana Penjamin						
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	7.671.500,00	43.336.700,00	97.359.900,00	46.463.150,00	7.523.750,00	5,163



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	7.671.500	43.336.700,00	4.425.902.100,00	4.380.374.100,00	4.375.445.100,00	105,767
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)			(4.328.542.200,00)	(4.333.910.950,00)	(4.367.921.350,00)	0,003
Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) neto	7.671.500	43.336.700,00	97.359.900,00	46.463.150,00	7.523.750,00	5,163
Dana Penjamin						
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	7.671.500,00	43.336.700,00	97.359.900,00	46.463.150,00	7.523.750,00	5,163
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	44.683.295.132	44.655.616.063,26	44.211.224.413,00	44.620.951.816,00	44.189.690.405,00	(0,004)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	44.690.966.632,26	44.698.952.763,26	44.308.584.313,00	44.667.414.966,00	44.197.214.155,00	(0,003)
						-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	44.690.966.632,26	44.698.952.763,26	44.308.584.313,00	44.667.414.966,00	44.197.214.155,00	(0,003)
ASET TETAP						
Tanah	137.611.679.400	136.782.738.400,00	137.393.054.955,00	154.961.181.255,00	153.027.708.255,00	0,123
Peralatan dan Mesin	212.937.613.559	286.626.809.662,00	295.518.414.152,00	312.204.785.861,00	335.883.426.037,00	0,453
Gedung dan Bangunan	418.356.249.209	475.945.551.928,00	473.437.876.319,00	555.150.010.026,00	635.547.808.722,00	0,341
Jalan Jaringan dan Instalasi	472.676.396.662	524.108.791.025,00	634.473.531.061,39	727.771.686.212,39	763.825.178.565,39	0,479



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset Tetap Lainnya	29.746.444.603	31.938.464.503,00	37.856.214.917,00	42.998.783.108,00	43.415.380.553,00	0,397
Konstruksi dalam Pengerjaan	16.344.555.565	49.193.853.930,00	83.359.616.446,00	54.790.568.193,00	70.649.324.917,00	2,434
Akumulasi Penyusutan	(337.960.976.003)	(403.153.905.822,00)	(481.326.710.108,00)	(603.991.908.180,00)	(646.153.541.519,00)	0,659
JUMLAH ASET TETAP	949.711.962.995,00	1.101.442.303.626,00	1.180.711.997.742,39	1.243.885.106.475,39	1.356.195.285.530,39	0,308
ASET LAINNYA						
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi						
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa						
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			516.000.000,00	516.000.000,00		(0,250)
Aset Tak Berwujud			741.883.000,00	1.351.927.000,00	1.386.927.000,00	0,829
Amortisasi Aset Tak Berwujud				(705.158.000,00)	(1.051.610.800,00)	0,123
Aset Tak Berwujud Neto		-	741.883.000,00	646.769.000,00	335.316.200,00	(0,249)
Aset Lain - Lain	1.447.822.704,00	1.483.210.603,00	104.067.023.545,00	-	95.325.470.707,00	68,188
Aset Lain-Lain- Aset Tetap	1.447.822.704,00	1.483.210.603,00	104.067.023.545,00	-	118.694.296.451,00	68,188
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				-	(23.368.825.744,00)	-
Aset Lain-Lain- Aset Tetap-Neto	1.447.822.704,00	1.483.210.603,00	104.067.023.545,00	-	95.325.470.707,00	68,188
Aset Lain-Lain-Piutang				-	1.859.324.750,00	-
Penyisihan Piutang				-	(1.859.324.750,00)	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Neto	-	-	-	-	-	
Kas Yang dibatasi Penggunaannya- Uang Jaminan				57.423.553.909,00	4.772.821.909,00	(0,229)
JUMLAH ASET LAINNYA	1.150.822.704,00	1.483.210.603,00	105.324.906.545,00	58.586.322.909,00	100.433.608.816,00	69,771
JUMLAH ASET	1.150.784.669.121,80	1.262.924.262.977,99	1.479.927.112.757,30	1.463.546.138.030,52	1.600.324.764.807,99	0,282
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.800.902.548	9.112.074.145,00	8.818.290.132,00	7.897.178.009,00	4.763.029,00	(0,675)
Utang Bunga						
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima Dimuka						
Utang belanja		2.306.951.150,00	6.971.100.539,00	5.536.052.803,00	10.587.856.506,00	2,044
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.174.506.700	15.799.491.143,00	264.386.998,00	878.715.200,00	7.515.674.903,00	7,206
Utang Bagi Hasil Pajak-Retri-busi						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.975.409.248,00	27.218.516.438,00	16.053.777.669,00	14.311.946.012,00	18.108.294.438,00	0,251
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	15.975.409.248,00	27.218.516.438,00	16.053.777.669,00	14.311.946.012,00	18.108.294.438,00	0,251
EKUITAS						
EKUITAS	1.134.809.259.874	1.235.705.746.539,99	1.463.873.335.088,30	1.449.234.192.018,52	1.582.216.470.369,99	0,286
JUMLAH EKUITAS	1.134.809.259.873,80	1.235.705.746.539,99	1.463.873.335.088,30	1.449.234.192.018,52	1.582.216.470.369,99	0,286
						-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.150.784.669.121,80	1.262.924.262.977,99	1.479.927.112.757,30	1.463.546.138.030,52	1.600.324.764.807,99	0,282

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



a) Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama periode Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,282 %. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata tumbuh sebesar 0,003 %, aset tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,308 %, sedangkan aset lancar mengalami penurunan rata-rata 0,217 %.

b) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi antar waktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 0,251 %. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak ada kewajiban jangka panjang.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Belu periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperoleh informasi bahwa jumlah ekuitas yang diperoleh sebesar 0,286 %. Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode 2016 sampai 2020 disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut



Tabel 3.6

Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Belu

Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar (current ratio)	9.70	4.24	9.32	8.13	5.49
2	Rasio lancar (current ratio)	9.70	4.24	9.32	8.13	5.49
3	Rasio total hutang terhadap total	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
4	Rasio hutang terhadap modal	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2020

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada Tahun 2016 adalah sebesar 9,70 dan cenderung turun pada tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2020 mencapai 5,49.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio cepat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih



likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada Tahun 2016 sebesar 9,70 dan Tahun 2020 quick rasio sebesar 5,49. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada Tahun 2016 sebesar 0,01 dan pada Tahun 2020 sebesar 0,01 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2016 rasio hutang terhadap modal Pemerintah



Daerah Kabupaten Belu sebesar 0,01 serta periode Tahun 2020 sebesar 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.1.3 Kinerja Pendanaan Non APBD

Selain pendanaan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, pembangunan di wilayah ini juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Kabupaten Belu, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selain bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten maupun perangkat daerah provinsi.

Pendanaan yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diperoleh dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan dan beberapa perusahaan. Kedepannya diharapkan adanya peningkatan kerja sama yang lebih luas dan berdampak kepada masyarakat Belu.



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Kebijakan pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Belu merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.



5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenang kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:



1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a) Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
 - b) Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - c) Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
 - d) Melaksanakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
 - e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
 - f) Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
 - g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya untuk mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.



- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
 - i) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - b) Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
- a) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.



- b) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
- c) Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

b. Kebijakan Belanja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung



semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Kabupaten Belu menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Belu selama Tahun 2016-2021 diarahkan untuk menjawab visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021.

c. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari Dana Cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah



melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman daerah.

2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah).
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan daerah.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.



Tabel 3.7

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

Kode	Uraian	2016			2017			2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	977.978.805.845,00	834.489.268.773,00	85,33	1.066.495.108.954,00	939.748.398.806,39	88,12	1.029.124.842.376,00	948.137.256.230,40	92,13
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	488.090.982.920,00	442.192.384.168,00	90,60	511.607.254.004,00	429.568.482.147,00	83,96	477.060.460.185,00	442.833.384.273,00	92,83
5.1.1	Belanja Pegawai	373.811.544.113,00	340.664.627.568	91,13	348.753.225.502,00	296.437.376.757	85,00	332.513.008.404,00	300.808.402.056	90,47
5.1.3	Belanja Subsidi	4.331.376.000,00	3.712.608.000	85,71	4.331.375.000,00	4.083.840.000	94,29	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	2.962.057.500,00	1.905.457.500	64,33	3.974.800.000,00	3.730.400.000	93,85	8.221.706.000,00	7.789.806.000	94,75
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	12.780.000.000,00	12.585.000.000	98,47	7.960.000.000,00	7.960.000.000	100,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.690.464.345,00	1.228.843.559	72,69	1.522.308.422,00	1.522.308.422	100,00	2.071.812.413,00	2.071.812.412	100,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	96.166.799.868,00	93.477.551.470	97,20	110.971.631.968,00	110.971.631.968	100,00	124.293.933.368,00	124.193.933.368	99,92
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.128.741.094,00	1.203.296.071	13,18	29.273.913.112,00	237.925.000	0,81	2.000.000.000,00	9.430.437	0,47
5.2	BELANJA LANGSUNG	489.887.822.925,00	392.296.884.605,00	80,08	554.887.854.950,00	510.179.916.659,39	91,94	552.064.382.191,00	505.303.871.957,40	91,53
5.2.1	Belanja Pegawai	67.155.207.125,00	62.237.183.591	92,68	76.770.146.689,00	72.303.076.012	94,18	86.740.807.975,00	81.950.927.345	94,48
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	163.294.260.079,00	137.948.765.430	84,48	205.429.674.525,00	189.470.908.024	92,23	252.223.970.093,00	228.952.632.214	90,77
5.2.3	Belanja Modal	259.438.355.721,00	192.110.935.584	74,05	272.688.033.736,00	248.405.932.623	91,10	213.099.604.123,00	194.400.312.398	91,23



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	2019			2020			Rata-Rata Pertumbuh	Rata-Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
5	BELANJA	1.073.761.619.440,00	992.180.923.715,74	92,40	1.010.169.200.972,00	960.175.047.336,00	95,05	2,75	90,61
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	476.281.714.883,00	458.211.282.460,00	96,21	521.950.192.056,00	501.005.413.706,00	95,99	1,66	91,92
5.1.1	Belanja Pegawai	325.262.658.975,00	308.236.058.085	94,77	316.929.658.809,00	300.125.015.085	94,70	1,10	91,21
5.1.3	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	8.636.158.000,00	8.046.348.000	93,17	40.703.594.000,00	38.278.192.000	94,04	11,53	88,03
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.975.000.000,00	2.975.000.000	100,00	5.057.500.000,00	4.620.000.000	91,35	30,97	77,96
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.705.811.840,00	1.705.811.840	100,00	1.705.811.840,00	1.705.811.840	100,00	9,39	94,54
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	137.302.086.068,00	137.248.064.535	99,96	136.490.909.421,00	136.461.986.923	99,98	0,71	99,41
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	-	-	21.062.717.986,00	19.814.407.858	94,07	67,91	21,71
5.2	BELANJA LANGSUNG	597.479.904.557,00	533.969.641.255,74	89,37	488.219.008.916,00	459.169.633.630,00	94,05	4,31	89,39
5.2.1	Belanja Pegawai	102.254.719.873,00	93.792.355.353	91,72	104.238.502.908,00	98.381.251.092	94,38	0,48	93,49
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	248.611.290.333,00	227.213.947.019	91,39	199.032.807.888,00	183.687.943.917	92,29	2,32	90,23
5.2.3	Belanja Modal	246.613.894.351,00	212.963.338.884	86,35	184.947.698.120,00	177.100.438.621	95,76	7,18	87,70

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi realisasi rata-rata pertumbuhan realisasi belanja terhadap anggaran belanja Tahun 2016–2020 sebesar 2,75%, dengan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 1,66% dan belanja langsung sebesar 4,31%. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia periode Tahun 2016–2020 rata-rata sebesar 90,61%. Lebih lanjut, rata-rata penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar 91,92% dan belanja langsung sebesar 89,39%.

Pada belanja tidak langsung, 3 (tiga) peringkat teratas rata-rata penyerapan anggaran terbesar selama periode 5 (lima) tahun tersebut berada pada jenis belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil, dilanjutkan dengan belanja pegawai dan belanja hibah. Sementara rata-rata penyerapan anggaran pada belanja langsung paling besar pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Belu ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Tabel 3.8
Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Belu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Belanja Tidak Langsung	346.381.815.568,00	303.350.545.507,00	309.091.811.956,00	318.193.722.035,00	305.210.210.285,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	337.039.906.562	292.879.324.475	295.928.781.246,00	302.664.178.231,00	292.125.022.564,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	630.232.500	579.490.000	847.353.750,00	1.980.705.000,00	1.024.188.582,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.879.790.518	2.100.996.000	2.655.396.000,00	2.667.996.000,00	5.645.996.000,00
4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	75.897.000	57.191.000	-		
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	829.714.568	630.696.062	1.133.507.860,00	675.266.929,00	1.196.252.034,00
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	209.086.420	189.679.220	243.363.200,00	247.911.925,00	118.893.105,00
	Belanja Uang Lembur	5.717.188.000	6.913.168.750	8.283.409.900,00	9.957.663.950,00	5.099.858.000,00
B.	Belanja Langsung	98.553.012.342,00	117.668.906.489,00	137.577.888.104,00	140.027.030.863,00	114.869.836.658,00
1	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	659.749.612	470.002.650	557.167.000,00	1.123.283.800,00	401.951.000,00
2	Belanja Pakaian Kerja	98.516.400	124.305.000	276.605.000,00	388.419.000,00	259.411.600,00
3	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	179.420.000	199.923.300	289.102.500,00	488.484.000,00	81.440.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	54.480.507.685	64.559.831.183	78.602.998.587,00	67.669.187.712,00	38.525.448.330,00
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.258.240.000	438.250.000	1.285.000.000,00	1.527.000.000,00	1.297.500.000,00
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.053.583.945	897.352.001	1.767.427.800,00	2.664.276.000,00	536.540.000,00
7	Belanja Honorarium PNS	13.596.999.700	18.724.620.635	18.947.787.269,00	19.936.099.856,00	15.423.268.567,00
8	Belanja Honorarium Non PNS	27.225.995.000	27.706.906.000	32.043.448.000,00	42.914.675.300,00	38.443.436.936,00
9	Belanja Pegawai Dana Bos	-	4.547.715.720	3.808.351.948,00	3.315.605.195,00	3.868.822.000,00
10	Belanja Pegawai BLUD					16.032.018.225,00
	Total	444.934.827.910,00	421.019.451.996,00	446.669.700.060,00	458.220.752.898,00	420.080.046.943,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020, data diolah



Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1	2016	444,934,827,910.00	834,489,268,773.00	53.32%
2	2017	421,019,451,996.00	939,748,398,806.39	44.80%
3	2018	446,669,700,060.00	948,137,256,230.40	47.11%
4	2019	458,220,752,898.00	992,180,923,715.74	46.18%
5	2020	420,080,046,943.00	873,397,112,875.00	48.10%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat antar tahun pada periode Tahun 2016–2020. Pada Tahun 2020 proporsinya adalah 48,10%. Ini berarti belanja untuk pembangunan tetap lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Belu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	435,371,022,597	408,931,317,147	427,074,147,836	447,189,934,460	438,278,151,048	0.728
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	337,039,906,562	292,879,324,475	295,928,781,246	302,664,178,231	292,125,022,564	(0.033)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	630,232,500	579,490,000	847,353,750	1,980,705,000	1,024,188,582	0.309
3	Biaya Pemungutan Pajak	75,897,000	57,191,000				(0.312)
4	Insentif Pemungutan Pajak	829,714,568	630,696,062	1,133,507,860	675,266,929	1,196,252,034	0.231
5	Insentif Pemungutan Retribusi	209,086,420	189,679,220	243,363,200	247,911,925	118,893,105	(0.078)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD						
7	Gaji dan Tunjangan DPRD dan kepala daerah	1,879,790,518	2,100,996,000	2,655,396,000	2,667,996,000	5,645,996,000	0.376
8	Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati						
9	Belanja Penerimaan Lainnya Bupati/Wakil Bupati						
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	919,633,623	1,058,114,095	2,071,812,412	1,705,811,840	1,705,811,840	0.233
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	309,209,936	464,194,327	-	-		(0.125)
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	93,030,532,400	110,486,917,000	123,709,218,400	136,817,371,100	135,976,964,102	0.102
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	447,019,070	484,714,968	484,714,968	430,693,435	485,022,821	0.025
B.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
Total A + B		435,371,022,597	408,931,317,147	427,074,147,836	447,189,934,460	438,278,151,048	0.728

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016-2020, diolah



3.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.



Tabel 3.11

**Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Belu
Tahun 2016–2020**

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	816.442.053.569,95	959.717.412.277,44	926.095.278.690,83	972.546.394.699,98	908.754.531.418,38
2	Belanja Daerah	834.489.268.773,00	939.748.398.806,39	948.137.256.230,40	992.180.923.715,74	865.356.150.869,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	8.040.962.006,00
A.	Defisit Riil	(18.047.215.203,05)	19.969.013.471,05	(22.041.977.539,57)	(19.634.529.015,76)	35.357.418.543,38
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.095.135.507,78	81.915.647.123,73	101.971.218.494,78	79.979.697.955,21	60.345.268.939,45
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	86.557.900,00	45.528.000,00	-	210.487.744,00
4	Koreksi	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan	96.095.135.507,78	82.002.205.023,73	102.016.746.494,78	79.979.697.955,21	60.555.756.683,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		78.047.920.304,73	101.971.218.494,78	79.974.768.955,21	60.345.168.939,45	95.913.175.226,83

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada Tahun 2016 yaitu Rp.78.047.920.304. Posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.95.913.175.226. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	78,047,920,304.73	101,971,218,494.78	79,974,768,955.21	60,345,168,939.45	95,913,175,226.83	(6,142)
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	78,047,920,304.73	101,971,218,494.78	79,974,768,955.21	60,345,168,939.45	95,913,175,226.83	(6,142)

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.13

**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	78.047.920.304,73	100,00	101.971.218.494,78	100	79.974.768.955,21	100	60.345.168.939,45	100	95.913.175.226,83	100	
Bersumber Dari:											
Pelampauan Pendapatan	(65.391.616.768,05)	-0,837839	(28.664.777.372,56)	-0,281111	-1.001.345.191,17	(0,01)	(21.240.455.785,02)	-0,35198	-48.887.593.244,62	(0,51)	(386.329)
Penghematan Belanja	143.489.537.072,00	1,83848	126.746.711.147,61	1,242966	80.987.586.145,60	1,01	81.580.695.724,26	1,351901	144.813.050.103,00	1,51	(144.553)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(49.999.999)	(0,0006)	3.889.284.719,73	0,038141	-11.471.999,22	(0,00014)	4.929.000,21	8,168E-05	-12.281.631,55	(0,0001)	(401.916)
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan											
Penghematan Pembiayaan Netto											

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016–2020, diolah



3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi-proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1 Proyeksi Pendapat dan Belanja

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak cukup parah pada sektor ekonomi terutama pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Daerah untuk Tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,22%, untuk Tahun 2021 sebesar Rp.886.285.420.673,- dan diakhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp.988.791.938.268,-. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan tetap. Dana perimbangan yang setiap tahunnya diproyeksikan naik adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata sebesar 2,50%. DAU diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN melalui pengadaan CPNS dan asumsi kenaikan gaji ASN.



Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	PROYEKSI						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	3.78	877,866,385,463	908,576,436,395	927,727,173,848	936,604,710,496	963,140,635,508	990,363,763,072	2.44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.70	102,952,009,790	110,010,620,832	114,035,886,352	119,111,783,511	124,239,578,099	129,420,567,551	4.69
Pajak Daerah	2.11	18,000,000,000	19,000,000,000	20,000,000,000	22,000,000,000	24,000,000,000	26,000,000,000	7.65
Retribusi Daerah	-5.24	11,822,690,918	15,865,111,100	16,261,738,877	16,668,282,349	17,084,989,408	17,512,114,143	8.84
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.12	9,572,724,012	10,000,000,000	11,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000	7.92
Lain-lain PAD Yang Sah	9.72	63,556,594,860	65,145,509,732	66,774,147,475	68,443,501,162	70,154,588,691	71,908,453,408	2.50
PENDAPATAN TRANSFER	0.25	748,210,603,973	771,862,043,863	786,987,515,796	790,789,155,285	812,197,285,709	834,239,423,821	2.20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.00	724,265,039,000	747,317,839,766	761,829,706,597	765,631,346,086	784,697,285,709	804,239,423,821	2.12
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-7.35	23,945,564,973	24,544,204,097	25,157,809,199	25,157,809,199	27,500,000,000	30,000,000,000	4.68
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.27	26,703,771,700	26,703,771,700	26,703,771,700	26,703,771,700	26,703,771,700	26,703,771,700	-
Pendapatan Hibah	691.76	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	3,294,571,700	-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.83	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	23,409,200,000	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi Tahun 2016–2020 dan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2026 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 4,69%. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar Rp.102.952.009.790,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat sampai dengan Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.129.420.567.551. Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi pada pos Pajak Daerah sebesar 7,65%, dimana pada Tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp.18.000.000.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2026 menjadi sebesar Rp 26.000.000.000. Sedangkan lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.63.556.594.860,- dan setiap tahunnya diproyeksikan akan meningkat sampai dengan Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.71.908.453.408,- atau rata-rata 2,50%.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer Khusus. Pendapatan Transfer



Pemerintah Pusat diproyeksikan meningkat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dengan mengacu pada perkembangan dari Tahun 2016-2020 yang walau berfluktuasi, namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk Dana Transfer Pusat diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,12%, dimana di Tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp.724.265.039.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp.804.239.423.821,- pada Tahun 2026. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi dalam Tahun 2021-2026 juga meningkat dengan rata-rata setiap tahun sebesar 4,68%, yang mana pada Tahun 2021 sebesar Rp.23.945.564.973,- meningkat menjadi Rp.30.000.000.000 pada Tahun 2026. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan, untuk Tahun 2021-2026 diasumsikan tetap.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar adalah Pendapatan Transfer sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.15. Walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Pendapatan Transfer. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Belu, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring pajak daerah secara kontinyu atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti: *tapping box* dan sejenisnya. *e-monitoring* Pajak Daerah sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan wajib pajak sekaligus. Bagi pemerintah daerah, manfaat utamanya adalah untuk



- mengetahui potensi pendapatan asli daerah yang sesungguhnya. Tujuan *e-monitoring* pajak daerah antara lain:
- a. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
 - b. Mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
2. Pemberian *Reward* dan *Punishment*.
 3. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
 4. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
 5. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
 6. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
 7. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box*) atau sejenisnya.



8. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
9. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
10. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
12. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
13. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek pajak daerah
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
18. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;



19. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk Tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,02%, yang mana untuk Tahun 2021 sebesar Rp.909.985.385.463,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp.1.005.363.763.072,- (Tabel 3.15). Proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55% dengan perincian:
 - a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 1,72% per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kenaikan ini juga sudah memperhitungkan proyeksi kenaikan belanja pegawai pada BLUD.
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 1,31% per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp.30.890.999.889,67,- yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage* dan juga adanya kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN yang direncanakan akan dilakukan melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu perlu adanya pencermatan dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa setiap tahunnya, dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilukada



- serentak Tahun 2024 yang wajib dipersiapkan di Tahun 2022 sampai dengan 2024.
- c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan bertambah dengan rata-rata sebesar 26,27% pertahun terutama untuk penyelenggaraan Pemilukada serentak pada Tahun 2024.
 - d. Proyeksi belanja bantuan sosial sampai dengan Tahun 2025 diasumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.14.475.625.500,-
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,30%.
 - 3) Belanja Tak Terduga sejak Tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,-/tahun.



Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Pertumbu 2016-2020	PROYEKSI						Rata-rata Pertumbu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	BELANJA	3,73	909.985.385.463	916.522.150.680	930.672.888.133	938.271.286.787	978.140.635.508	1.005.363.763.072	2,02
5.1	BELANJA OPERASI	3,50	640.158.644.768	668.539.259.035	680.754.751.633	690.288.395.142	679.108.870.353	690.692.962.028	1,55
5.1.01	Belanja Pegawai	- 6,25	345.352.926.282	374.760.151.369	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	1,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,39	272.550.552.318	271.190.114.006	271.279.126.133	270.812.769.642	279.633.244.853	290.692.962.028	1,31
5.1.05	Belanja Hibah	145,90	7.993.466.168	8.113.368.160	20.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	26,27
	Belanja Bantuan Sosial	- 14,69	14.261.700.000	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	15.000.000.000	1,02
5.2	BELANJA MODAL	0,07	97.517.723.761	93.980.489.615	95.915.734.470	93.980.489.615	145.029.363.125	160.668.399.014	12,30
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		33.254.221.842	14.716.987.696	16.652.232.551	14.716.987.696	23.254.221.842	23.254.221.842	0,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		19.875.922.547	19.875.922.547	19.875.922.547	19.875.922.547	24.875.922.547	29.875.922.547	9,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		37.255.420.372	52.255.420.372	52.255.420.372	52.255.420.372	89.767.059.736	100.406.095.625	24,78
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	7.132.159.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		35.360.837.594	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-11,52
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		35.360.837.594	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-11,52
5.4	BELANJA TRANSFER	10,13	136.948.179.340	139.002.402.030	139.002.402.030	139.002.402.030	139.002.402.030	139.002.402.030	0,30
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10,58	1.705.811.840	3.404.563.800	2.208.693.194	2.208.693.194	1.705.811.840	1.705.811.840	8,34
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10,14	135.242.367.500	135.597.838.230	136.793.708.836	136.793.708.836	137.296.590.190	137.296.590.190	0,30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam masa kepemimpinan daerah saat ini yang relatif singkat, persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belu dalam aspek pembiayaan daerah adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan bagi daerah, optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan dan peluang pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang daerah untuk akselerasi pembiayaan program prioritas daerah khususnya pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan produksi dan produktifitas daerah.

Dengan demikian, Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada:

- 1) Memberikan peluang-peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan.
- 2) Menciptakan pembiayaan anggaran dengan risiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas kesinambungan anggaran daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari:

- a) Dana SILPA.

Secara riil, penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SILPA, namun demikian dari aspek perencanaan tidak diperkenankan untuk memproyeksikan SILPA.

- b) Dana pinjaman jangka menengah/jangka panjang yang terkait langsung dengan proyek-proyek yang terukur profitabilitasnya baik dari segi nilai maupun kurun waktu yang diperlukan untuk menghasilkannya (pinjaman reguler untuk pembiayaan infrastruktur).
- c) Pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Pemulihan Ekonomi Daerah untuk membiayai sektorsektor produktif, seperti pertanian, peternakan,



- perikanan dan kehitanan dengan pola pendekatan investasi, bukan sekedar pelaksanaan proyek.
- d) Pemanfaatan dana PEN Kementerian/Lembaga.
 - 3) Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
 - 4) Mengembangkan pola kerja sama dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan model *shar* baik dari pusat, kabupaten/kota swasta, dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR), maupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD dan BUMDES sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan BUMDES yang bersangkutan

Sesuai Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi daerah) dan transfer ke rekening dana cadangan. Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, maka penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

Dengan memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026 terutama untuk menutupi defisit anggaran, sehingga alternatif pembiayaannya antara lain dengan pinjaman daerah. Adanya pengeluaran pembiayaan daerah



pada Tahun 2021 sebesar Rp.7.881.000.000,- dan terus bertambah menjadi 13.779.137.994,- di Tahun 2024 adalah merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank NTT sebagai salah satu tambahan sumber pendapatan daerah. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam Tabel 3.16 berikut.



Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020 (%)	Tahun Awal	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN DAERAH		- 7.435.285.715	- 12.054.285.715	- 12.054.285.715	- 13.333.423.709	445.714.285	445.714.285	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	-
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	445.714.285	-
6 Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020 (%)	Tahun Awal	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-	-
1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Penyertaan Modal Daerah	-	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-	-
3 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenan (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



3.3.2 Analisa Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta

Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan ssebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan Keputusan Bupati.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak Keputusan Bupati.
- c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah PILKADA, hibah KONI, Kepramukaan dan Hibah partai Politik

2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.



Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 ditunjukkan Tabel 3.17 berikut.



Tabel 3.17
Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	435.371.022.597	408.931.317.147	427.074.147.836	447.189.934.460	438.278.151.048	0,728
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	337.039.906.562	292.879.324.475	295.928.781.246	302.664.178.231	292.125.022.564	(0,033)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	630.232.500	579.490.000	847.353.750	1.980.705.000	1.024.188.582	0,309
3	Biaya Pemungutan Pajak	75.897.000	57.191.000				(0,312)
4	Insentif Pemungutan Pajak	829.714.568	630.696.062	1.133.507.860	675.266.929	1.196.252.034	0,231
5	Insentif Pemungutan Retribusi	209.086.420	189.679.220	243.363.200	247.911.925	118.893.105	(0,078)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD						
7	Gaji dan Tunjangan DPRD dan kepala daerah	1.879.790.518	2.100.996.000	2.655.396.000	2.667.996.000	5.645.996.000	0,376
8	Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati						
9	Belanja Penerimaan Lainnya Bupati/Wakil Bupati						
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	919.633.623	1.058.114.095	2.071.812.412	1.705.811.840	1.705.811.840	0,233
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	309.209.936	464.194.327	-	-		(0,125)
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	93.030.532.400	110.486.917.000	123.709.218.400	136.817.371.100	135.976.964.102	0,102
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	447.019.070	484.714.968	484.714.968	430.693.435	485.022.821	0,025
B.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
Total A + B		435.371.022.597	408.931.317.147	427.074.147.836	447.189.934.460	438.278.151.048	0,728

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Belu 2016-2020, diolah



Berdasarkan realisasi anggaran Tahun 2020, diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Belu 2021-2026 seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Kabupaten Belu 2021-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI						Rata-rata Pert (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	BELANJA OPERASI	640.158.644.768	668.539.259.035	680.754.751.633	690.288.395.142	679.108.870.353	690.692.962.028	1,55
1	Belanja Pegawai	345.352.926.282	374.760.151.369	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	1,72
2	Belanja Barang dan Jasa	272.550.552.318	271.190.114.006	271.279.126.133	270.812.769.642	279.633.244.853	290.692.962.028	1,31
3	Belanja Hibah	7.993.466.168	8.113.368.160	20.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	26,27
4	Belanja Bantuan Sosial	14.261.700.000	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	14.475.625.500	15.000.000.000	1,02
B	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.360.837.594	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-11,52
5	Belanja Tidak Terduga	35.360.837.594	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-11,52
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-	-
6	Penyertaan Modal Pemda	7.881.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	13.779.137.994	-	-	-
	JUMLAH	683.400.482.362	696.039.259.035	708.254.751.633	719.067.533.136	694.108.870.353	705.692.962.028	0,67

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

URAIAN	PROYEKSI					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Pendapatan	877,866,385,463	908,576,436,395	927,727,173,848	936,604,710,496	963,140,635,508	990,363,763,072
2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445,714,285	445,714,285	445,714,285	445,714,285	-	-
TOTAL PENERIMAAN	878,312,099,748	909,022,150,680	928,172,888,133	937,050,424,781	963,140,635,508	990,363,763,072
DIKURANGI						
3 Belanja Wajib Mengikat	683,400,482,362	696,039,259,035	708,254,751,633	719,067,533,136	694,108,870,353	705,692,962,028
Kapasitas Riil Kemampuan	194,911,617,386	212,982,891,645	219,918,136,500	217,982,891,645	269,031,765,155	702,558,800,816

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu 2021, diolah



Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II, Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I:** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II:** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
- c. **Prioritas III:** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

a. **Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)**

Dalam penganggaran, SiLPA hanya terjadi jika: 1) Pendapatan melampaui target, dan/atau 2) Efisiensi terhadap belanja daerah. Dalam perencanaan penganggaran, proyeksi SiLPA



sedapat mungkin dihindari untuk memberikan gambaran kinerja perencanaan penganggaran yang baik. Diharapkan agar pada tahun-tahun mendatang, proses perencanaan, penganggaran serta pengendalian dan evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan efisien serta sesuai dengan yang direncanakan.

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Hasil Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel 3.19, memberikan gambaran bahwa kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat masih terbesar ada pada belanja operasi diproyeksikan tiap tahunnya naik rata-rata sebesar 0,67% atau Rp.701.093.976.452,- per tahun.

c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Selanjutnya Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu ditampilkan pada tabel 3.20. Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu cenderung meningkat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026. Rata-rata peningkatannya diproyeksikan sebesar 39,24%, sehingga pada Tahun 2026 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp.702.558.800.816,-

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk



sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II, dan 2) Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) **Prioritas I** : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- 2) **Prioritas II** : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, serta dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
- 3) **Prioritas III** : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.